

RENCANA KERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

2. VISI :

Menjadi penggerak utama sinergitas lintas sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. MISI :

- Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipedomani oleh Kementerian dan Lembaga

No.	Kegiatan	Isu Strategi	Permasalahan	Output	Indikator	Komponen Pelaksanaan Kegiatan	Aktivitas Pencapaian Output	Volume	Lokasi	Urgensi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Penanganan konflik secara humanis	Konflik vertikal maupun horizontal terus terjadi disebabkan akar permasalahan tidak terselesaikan dengan baik	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Intelkam	Rekomendasi bidang Intelkam	Identifikasi Masalah Bidang Intelkam	1 Rapat Koordinasi	6	Jakarta	Kurangnya koordinasi intelijen baik pusat maupun daerah sehingga akar-akar konflik tidak tertangani, bahkan menjadi konflik terbuka	2,096,540,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Intelkam		Analisis Kebijakan Bidang Intelkam					
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelkam	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Intelkam	2 Pemantauan Koordinasi	10	Jabar, Banten, Sumsel, Sumbar, Sumut, Jambi, Riau, Kaltim, Papua	Korsidal antar aparat intel baik pusat maupun daerah perlu digali dari titik permasalahan sehingga dapat memberikan persamaan persepsi dalam pencegahan terjadinya konflik terbuka.	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelkam	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Intelkam					
2	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Pengamanan Obvitnas	Evaluasi pelaksanaan sistem pengamanan belum secara kontinyu dan terlaksana pada obyek yang dikategorikan sebagai Obvitnas.	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Bimmas dan Obvitnas	Rekomendasi bidang pengamanan Obvitnas	Identifikasi Masalah Bidang Bimmas dan Obvitnas	1 Rapat Koordinasi	4	Jakarta	Perlunya identifikasi permasalahan tidak terselenggaranya pengamanan Obvitnas sesuai SOP.	2,096,540,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Bimmas dan Obvitnas		Analisis Kebijakan Bidang Bimmas dan Obvitnas					
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Bimmas dan Obvitnas	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Bimmas dan Obvitnas	2 Pemantauan Koordinasi	8	Papua, Sulut, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Kaltim	Korsidal antar aparat pengamanan baik pusat maupun daerah perlu digali dari titik permasalahan sehingga dapat memberikan persamaan persepsi dalam pencegahan terjadinya konflik terbuka.	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Bimmas dan Obvitnas	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Bimmas dan Obvitnas					
3	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Gerakan Indonesia Tertib	Revolusi mental perlu didukung dengan upaya peningkatan tertib pada berbagai bidang.	Laporan pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib	Rekomendasi Gerakan Indonesia Tertib	Pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib	1 Rapat Koordinasi	4	Jakarta	Korsidal instansi yang dapat meningkatkan upaya tertib.	2,227,890,000
							2 Sosialisasi	4	Aceh, Jatim, Bali, Sulsel	Revolusi mental perlu disosialisasikan ke berbagai lokasi untuk dapat diterapkan secara menyeluruh.	
							3 Rembuk GIT	4	Aceh, Jatim, Bali, Sulsel	Rembuk sebagai sarana konsolidasi untuk menemukan rekomendasi yang tepat terhadap peningkatan tertib.	
4	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk	Tingkat kriminalitas yang tinggi pada beberapa wilayah	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	Rekomendasi bidang penanganan Kejahatan Konvensional	Identifikasi Permasalahan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	1 Rapat Koordinasi	4	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Kejahatan Konvensional	2,227,890,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Konvensional		Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional					
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	2 Pemantauan Koordinasi	9	Sumut, DIY, Sulsel, Kaltara, NTB, Sumsel, Jateng, Kalsel dan Maluku	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Kejahatan Konvensional	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional					

No.	Kegiatan	Isu Strategi	Permasalahan	Output	Indikator	Komponen Pelaksanaan Kegiatan	Aktivitas Pencapaian Output	Volume	Lokasi	Urgensi	Anggaran
5		Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (perkara) dan penyelamatan kerugian negara dari dampak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.	Ancaman tindak pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berpotensi merusak lingkungan dan menyebabkan Kerugian Negara	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Rekomendasi bidang penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	1 Rapat Koordinasi	9	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2,000,000,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	2 Pemantauan Koordinasi	8	Kaltim, Sultra, Sumsel, Kalsel, Jambi, Sumsel, Riau, NTB	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara		
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional					Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti					Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	
6	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masih tingginya angka kriminalitas dan gangguan keamanan di beberapa wilayah	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan stabilitas keamanan nasional	Rekomendasi kebijakan bidang stabilitas keamanan nasional	Operasional penyusunan rekomendasi kebijakan bidang stabilitas keamanan nasional	1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	20	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Stabilitas Keamanan Nasional	2,406,029,000
							2 Pengendalian Isu Strategis	22	Kusta, Inggris, Jawa Tengah, DIY, Fiji, Sumut, Jatim NTB, Sulsel, Sulteng	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan Stabilitas Keamanan Nasional	
							3 Rakornas Monitoring dan Evaluasi	3	Jakarta	Mendorong pencapaian target Indeks Kamtibmas	
7	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Dengan adanya Ibu Kota Baru, perlu adanya sebuah Grand Desain Pengendalian Keamanan untuk mewujudkan situasi stabilitas keamanan yang terjamin	Ancaman keamanan tidak datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang/organisasi di luar sistem diplomatik sekarang seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat.	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibukota Negara Baru	Rekomendasi Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibukota Negara Baru	Operasional Penyusunan Rekomendasi Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibukota Negara Baru	1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri	6	Balikpapan	Pembangunan pertahanan yang mampu mengatasi semua bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Ancaman keamanan nasional yang terus meningkat, Peredaran Gelap Narkotika, Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan, Penyebaran Paham Radikal, Grand Desain Keamanan Ibu Kota Negara dan Pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	3,000,000,000
							2 Pengendalian Isu Strategis	18	Balikpapan	Mengidentifikasi permasalahan di lapangan secara langsung, dan mengupayakan opsi-opsi penyelesaian masalah dengan pendekatan langsung	
							3 FGD di Balikpapan	1	Balikpapan	Grand Desain Sistem Keamanan Ibukota Negara Baru merupakan tolak ukur dalam skema pengendalian keamanan nasional yang akan diwujudkan dalam menjaga stabilitas keamanan	
							4 Monev di Balikpapan	1	Balikpapan	Memberikan gambaran dari hasil monitoring dan koordinasi dalam kesiapan K/L/D melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan serta untuk sarana komunikasi dan interaksi terkait permasalahan/ debottlenecking Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Design Sistem Keamanan Ibukota Negara Baru	
8	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Penanganan kejahatan transnasional secara terkoordinir dan sinergis	Penanganan kejahatan transnasional oleh K/L/D pelaksana masih belum optimal	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	Rekomendasi bidang penanganan kejahatan transnasional	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	1 Rapat Koordinasi	4	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan kejahatan transnasional	1,858,286,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	2 Pemantauan Koordinasi	4	Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan kejahatan transnasional		
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional					Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	4 Forum Koordinasi dan Sinkronisasi	1	Nusa Tenggara Timur	Tidak diketahuinya upaya K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan kejahatan transnasional	

No.	Kegiatan	Isu Strategi	Permasalahan	Output	Indikator	Komponen Pelaksanaan Kegiatan	Aktivitas Pencapaian Output	Volum e	Lokasi	Urgensi	Anggaran
9		Penanganan kejahatan luar biasa secara terkoordinir dan sinergis	Penanganan kejahatan luar biasa oleh K/L/D pelaksana masih belum optimal	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	Rekomendasi bidang penanganan kejahatan luar biasa	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	1 Rapat Koordinasi	4	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan kejahatan luar biasa	1,000,200,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa		Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	2 Pemantauan Koordinasi	4	Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan kejahatan luar biasa	
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Kejahatan Luar Biasa	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	3 Focus Group Discussion (FG)	1	Jawa Tengah	Tidak didapatkannya langkah-langkah penanganan terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan kejahatan luar biasa	
				Laporan Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Kejahatan Luar Biasa	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	4 Forum Koordinasi dan Sinkronisasi	1	D.I Yogyakarta	Tidak diketahuinya upaya K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan kejahatan luar biasa	
10	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Penanganan Luar Negeri yang Berlandaskan HAM	Penanganan pengungsi dari luar negeri oleh K/L/D pelaksana masih belum optimal	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	1 Rekomendasi bidang penanganan pengungsi dari luar negeri	Operasional Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	1 Rapat Koordinasi	8	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan pengungsi dari luar negeri	775,581,000
							2 Pemantauan Evaluasi	6	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan pengungsi dari luar negeri	
							3 Focus Group Discussion (FG)	1	Jakarta	Tidak didapatkannya langkah-langkah penanganan terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan pengungsi dari luar negeri	
11	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Penanganan konflik secara humanis	Penanganan konflik oleh K/L/D pelaksana masih belum optimal	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Konflik	Rekomendasi bidang penanganan konflik	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Konflik	1 Rapat Koordinasi	8	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan konflik sosial	
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Konflik		Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Konflik	2 Pemantauan Koordinasi	8	Sumsel, Sumbar, Sumut, Jambi, Riau, Sulbar, Kaltim, Papua	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan konflik sosial	
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Konflik	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Konflik	3 Focus Group Discussion (FG)	1	Jawa Barat	Tidak didapatkannya langkah-langkah penanganan terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan konflik sosial	
				Laporan Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Konflik	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Konflik	4 Forum Koordinasi dan Sinkronisasi	1	Kalsel	Tidak diketahuinya upaya K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan konflik sosial	
12		Keselamatan dan keamanan transportasi	Keamanan transportasi darat, laut, dan udara masih belum sepenuhnya terjamin	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	Rekomendasi bidang penanganan Keamanan Transportasi	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	1 Rapat Koordinasi	8	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan keamanan transportasi	2,789,830,000
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanganan Keamanan Transportasi		Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	2 Pemantauan Koordinasi	8	Kepri, Sumsel, Babel, Lampung, Jatim, NTT, Maluku Utara, Papua Barat	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan keamanan transportasi	
				Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	3 Focus Group Discussion (FG)	1	Jawa Barat	Tidak didapatkannya langkah-langkah penanganan terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan keamanan transportasi	
				Laporan Tindaklanjut Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	4 Forum Koordinasi dan Sinkronisasi	1	Bali	Tidak diketahuinya upaya K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan keamanan transportasi	
13		Penanggulangan kebakaran hutan	Belum optimalnya	Laporan Identifikasi dan agenda setting Bidang Penanggulangan Karhutla	Rekomendasi bidang penanganan karhutla	Identifikasi Masalah Bidang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Rapat Koordinasi	8	Jakarta	Tidak teridentifikasinya permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan karhutla	
				Laporan Analisis Kebijakan bidang Penanggulangan Karhutla		Analisis Kebijakan Bidang Penanganan Karhutla	2 Pemantauan Koordinasi	8	Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng	Tidak didapatkannya analisa terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan karhutla	

No.	Kegiatan	Isu Strategis	Permasalahan	Output	Indikator	Komponen Pelaksanaan Kegiatan	Aktivitas Pencapaian Output	Volume	Lokasi	Urgensi	Anggaran
		kelestarian hutan dan lahan (karhutla)	penanggulangan karhutla	Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Karhutla	% Rekomendasi Kebijakan yang sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	Penyusunan Rekomendasi Bidang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	3 Focus Group Discussion (FG)	1	Jawa Barat	Tidak didapatkannya langkah-langkah penanganan terkait permasalahan, isu, dan indikator dalam penanganan karhutla	
				Laporan Tindaklanjuti Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanggulangan Karhutla	% Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Forum Koordinasi dan Sinkronisasi	1	Riau	Tidak diketahuinya upaya K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan karhutla	
14	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Pelayanan Administrasi di unit Kedepuitan adalah salah satu Pelayanan yang sangat penting dan untuk penunjang koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.	1. Ketepatan pengiriman Data Administrasi Pelayanan yang masih sering terlambat dari batas waktu permintaan. 2. Masih seringnya penggunaan data yang sebelumnya dan hanya mengganti tahun/bulan.	Layanan	Jumlah Layanan	Operasional Manajemen Umum	1 Tata Kelola Kepegawaian pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 2 Tata Kelola Kearsipan pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 3 Bimtek Administrasi Pelayanan Publik pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 4 Pendataan Barang dan Jasa pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023	3 3 3 2	1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Barat 1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Jawa Barat	Untuk mendukung Kinerja Pelayanan Administrasi di Sekretariat Deputi V, agar Pelayanan di bagian Administrasi menjadi lebih baik, cepat, responsif, dan lebih mudah untuk pelayanan internal maupun eksternal.	529,286,000
						Operasional Administrasi Ketatausahaan	1 Bimtek Peningkatan Nilai Zona Integritas (ZI) pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 2 Bimtek Peningkatan Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 3 Kodefikasi Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 4 Klasifikasi Identifikasi Risiko pada Deputi V/Kamtibmas TA. 2023 5 Bimtek Peningkatan Penilaian indeks kepuasan pelayanan publik dan layanan sekretariat Deputi V/Kamtibmas TA. 2023	3 3 2 4 2	1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Jawa Barat 1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Banten 1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Jawa Barat 3. Prov. Banten Prov. Jawa Barat		
15	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (4555)	Dokumen SAKIP merupakan	1. Ketepatan pengiriman Data yang masih sering lewat dari batas waktu permintaan. 2. Masih seringnya penggunaan data yang sebelumnya dan hanya			Penyusunan Rencana Program & Anggaran	1 Kategorisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan penarikan Dana Bulanan TA. 2023 pada Kedepuitan V/Kamtibmas 2 Pembentukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Kedepuitan V/Kamtibmas pada TA. 2023 3 Pengerjaan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja Deputi V/Kamtibmas TA. 2023	5 3 4	1. Prov. DKI Jakarta/Rupat Polhukam 2. Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Barat 1. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat	Untuk mendukung kegiatan penyusunan SAKIP	

No.	Kegiatan	Isu Strategi	Permasalahan	Output	Indikator	Komponen Pelaksanaan Kegiatan	Aktivitas Pencapaian Output	Volum e	Lokasi	Urgensi	Anggaran
		merupakan Dokumen Pertanggungjawaban yang sangat penting untuk menunjang Perencanaan dan Kegiatan pada Deputi V/Kamtibmas.	mengganti tahun/bulan. 3. Aplikasi penganggaran & Aplikasi pendukung di bagian perencanaan yang selalu berubah tiap tahunnya 4. Aplikasi pemantauan dan Evaluasi yang selalu berubah tiap tahunnya	Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP		4 Pengerjaan RKA-K/L TA. 2024 pada Deputi V/Kamtibmas	5	1. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat	Untuk mendukung kegiatan penyusunan Renstra 2023 dan mendukung Kinerja pada bagian Perencanaan & Evaluasi di Deputi V/Kamtibmas, agar dokumen SAKIP menjadi dokumen yang mampu di pertanggungjawaban dengan baik, serta memperbaiki kebijakan yang sebelumnya serta mendorong unit di Deputi untuk melakukan Inovasi dan mendesain Program & Kegiatan yang lebih berkualitas.	1,027,727,000
						1 Penyelesaian Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan LAKIP Tahunan pada Kedeputian V/Kamtibmas	5	1. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat			
						2 Peningkatan Kemampuan SDM Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Sekretariat Deputi V/Kamtibmas	2	1. Prov. Banten 2. Prov. Jawa Barat			
						3 Panduan penggunaan Aplikasi Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Bagian Perencanaan dan Evaluasi Deputi V/Kamtibmas	5	1. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat			
						1 Peninjauan Renstra 2020-2024 Deputi V/Kamtibmas pada TA. 2023	1	Prov. Jawa Barat			

Jakarta, Januari 2024
Deputi V/Kamtibmas,

Dis. Rudolf Alberth Rodja